POLITIK IDENTITAS BERBASIS KEAGAMAAN CALON KEPALA DAERAH DALAM RELASI DENGAN ORGANISASI KEAGAMAAN ALKHAIRAAT PADA PILKADA TAHUN 2024 DI KOTA PALU

Muhammad Abdul Khalik Bas
NPP. 33.0892
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: khalikbas@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ardika Nurfurqon, S.STP., M.H.
Email: ardikanurfurqon@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This study addresses the phenomenon of religion-based identity politics employed by regional head candidates in the 2024 Local Election (Pilkada) in Palu City, specifically through their strategic relations with the Alkhairaat religious organization, which possesses a strong and deeply rooted social base in the community. Although studies on identity politics in Indonesia are relatively abundant at the national level, scholarly inquiry specifically examining the dynamics of local religious organization involvement in regional head contests—particularly in Central Sulawesi—remains limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the practice of religion-based identity politics of regional head candidates in relation to the Alkhairaat religious organization in the 2024 Pilkada in Palu City.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including in-depth interviews (8 informants) selected through purposive sampling, observation, literature study, and documentation, analyzed through Miles and Huberman's (1994) interactive model.* ***Result:*** *The findings reveal that identity politics operates through three main mechanisms: social identity bases (religious, ethnic, and cultural similarities utilized to build emotional closeness), elite mobilization and identity issues (use of religious symbols and political rhetoric in campaigns), and social conflict and polarization (division of society based on political choices tied to religious identity). Alkhairaat firmly maintains its position as an independent organization refraining from direct political involvement; however, political actors continue to exploit the organization's symbolic capital to build electoral legitimacy.* ***Conclusion:*** *Religion-based identity politics significantly shaped the dynamics of the 2024 Pilkada in Palu City, where the strategic utilization of Alkhairaat's religious identity influenced the electability and public legitimacy of regional head candidates.*

Keywords: Alkhairaat; identity politics; local election (Pilkada); local politics; religion

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penelitian ini mengkaji fenomena politik identitas berbasis keagamaan yang digunakan oleh calon kepala daerah pada Pilkada 2024 di Kota Palu, khususnya melalui relasi strategis dengan organisasi keagamaan Alkhairaat yang memiliki basis sosial yang kuat dan mengakar dalam masyarakat. Meskipun penelitian tentang politik identitas di Indonesia cukup banyak dilakukan pada level nasional, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik menganalisis dinamika keterlibatan organisasi keagamaan lokal dalam kontestasi kepala daerah, khususnya di Sulawesi Tengah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik identitas berbasis keagamaan calon kepala daerah dalam relasi dengan organisasi keagamaan Alkhairaat pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Palu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (8 informan) yang dipilih secara *purposive*, observasi, studi literatur, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas berlangsung melalui tiga mekanisme utama: basis identitas sosial (kesamaan agama, etnis, dan budaya yang dimanfaatkan untuk membangun kedekatan emosional), mobilisasi elit dan isu identitas (penggunaan simbol keagamaan dan retorika politik berbasis agama dalam kampanye), serta konflik dan polarisasi sosial (terbelahnya masyarakat berdasarkan pilihan politik yang dikaitkan dengan identitas keagamaan). Alkhairaat secara institusional menjaga posisi independen, namun aktor politik terus mengeksploitasi modal simbolik organisasi untuk membangun legitimasi elektoral. **Kesimpulan:** Politik identitas berbasis keagamaan secara signifikan mewarnai dinamika Pilkada 2024 Kota Palu, di mana pemanfaatan identitas religius Alkhairaat berpengaruh terhadap elektabilitas dan legitimasi sosial calon kepala daerah.

Kata kunci: Alkhairaat; identitas keagamaan; Pilkada; politik identitas; politik lokal.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pilkada memainkan peran penting dalam membangun demokrasi lokal dengan meningkatkan partisipasi dan memastikan kepemimpinan yang berkualitas. Dalam praktiknya, Pilkada sering memunculkan dinamika politik yang melibatkan politik identitas berbasis etnis, kedaerahan, dan agama. Fenomena politik identitas terus menjadi salah satu

dinamika paling dominan dalam politik Indonesia kontemporer. Haboddin (2012) menegaskan bahwa politik identitas telah menjadi pola yang berulang dalam berbagai kontestasi elektoral, sehingga sulit dipisahkan dari praktik demokrasi Indonesia modern.

Secara historis, politik identitas memiliki akar panjang dalam proses pembentukan Indonesia sebagai bangsa. Perkembangan demokrasi elektoral pascareformasi memperlihatkan bagaimana identitas tersebut digunakan kembali secara politis dalam kontestasi kekuasaan, termasuk pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang memunculkan polarisasi tajam akibat sentimen keagamaan yang digunakan secara masif dalam kampanye.

Di tingkat lokal, fenomena politik identitas muncul dengan karakteristik yang beragam, mencerminkan konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing wilayah. Di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, dinamika antara kelompok keagamaan besar dan tokoh lokal kerap membentuk arah politik daerah. Kota Palu memiliki komposisi demografi yang didominasi oleh pemeluk Islam sebesar 88,39% (349.398 jiwa), sehingga faktor agama menjadi instrumen penting dalam kontestasi Pilkada.

Sebagai organisasi keagamaan tertua dan terbesar di Sulawesi Tengah, Alkhairaat yang didirikan pada tahun 1930 oleh Habib Idrus bin Salim Aljufri (Guru Tua) memiliki pengaruh sosial, pendidikan, dan kultural yang sangat besar. Organisasi ini menaungi lebih dari 1.096 madrasah dan sekolah serta 16 pondok pesantren di Sulawesi Tengah, menjadikannya sebagai kekuatan sosial yang berperan penting dalam membentuk opini publik serta preferensi politik masyarakat setempat. Perbandingan Pilkada 2020 dan 2024 di Kota Palu menunjukkan pergeseran signifikan: pada 2024, pasangan Hadianto–Imelda memperoleh kemenangan dengan 107.166 suara (63,5%), mengindikasikan penguatan basis dukungan yang terstruktur termasuk kedekatan dengan jaringan tokoh agama dan Alkhairaat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Meskipun penelitian tentang politik identitas di Indonesia cukup banyak dilakukan pada level nasional dan beberapa daerah besar, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik menganalisis dinamika keterlibatan organisasi keagamaan lokal dalam kontestasi kepala daerah di Sulawesi Tengah, khususnya terkait relasi antara calon kepala daerah dengan Alkhairaat pada Pilkada 2024 Kota Palu. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung memfokuskan kajian pada level nasional (Pemilu 2019 dan DKI Jakarta 2017) serta belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana organisasi keagamaan lokal bersikap terhadap politisasi identitasnya.

Penulis berfokus pada kesenjangan antara besarnya pengaruh Alkhairaat dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Kota Palu di satu sisi, dengan terbatasnya pemahaman ilmiah tentang mekanisme dan batas-batas keterlibatan organisasi tersebut dalam dinamika Pilkada 2024 di sisi lain.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat fenomena politik identitas berbasis keagamaan yang memanfaatkan organisasi seperti Alkhairaat berpotensi mengancam independensi lembaga keagamaan, memicu polarisasi sosial, dan melemahkan kualitas demokrasi lokal. Tanpa kajian empiris yang memadai, pemerintah dan pemangku kepentingan akan kekurangan dasar ilmiah untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mencegah eksploitasi politik terhadap organisasi keagamaan dan menjaga harmoni sosial di Kota Palu.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan, baik dalam konteks politik identitas maupun organisasi keagamaan dalam politik lokal Indonesia. Firdaus dan Andriyani (2021) mengkaji pengaruh identitas agama dalam dinamika politik lokal Indonesia menggunakan metode kualitatif, menemukan bahwa identitas keagamaan secara signifikan memengaruhi dukungan elektoral. Wati (2021) meneliti menguatnya politik identitas di Indonesia berdasarkan faktor agama, sosial, dan etnis, yang menunjukkan pola eskalasinya pascareformasi. Yunus dkk. (2023) menganalisis politik identitas dan politisasi agama dalam konteks Pemilu Indonesia, menegaskan bahwa narasi identitas keagamaan menjadi alat mobilisasi massa yang efektif. Rambe dan Mayasari (2022) mengembangkan kerangka teoretis politik identitas dan krisis identitas yang menjadi acuan pengukuran dalam penelitian ini. Warsah (2018) mengkaji relevansi relasi sosial terhadap motivasi beragama dalam masyarakat multiagama, dengan temuan bahwa identitas keislaman dapat menjadi faktor pemersatu sekaligus pemisah dalam interaksi sosial. Hadiz (2018) menganalisis populisme Islam dalam politik Indonesia melalui kajian berbasis Scopus, menegaskan bahwa mobilisasi berbasis agama erat kaitannya dengan strategi legitimasi politik elektoral.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dari segi (1) konteks lokasi: belum ada kajian serupa yang secara spesifik menganalisis relasi antara calon kepala daerah dengan Alkhairaat pada Pilkada 2024 Kota Palu; (2) pendekatan: mengombinasikan teori politik identitas Rambe dan

Mayasari (2022) dengan analisis kelembagaan organisasi keagamaan lokal; serta (3) objek penelitian: menjadikan Alkhairaat sebagai unit analisis organisasi keagamaan yang bersikap independen namun dimanfaatkan secara simbolik dalam kontestasi politik, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada partai politik atau gerakan sosial keagamaan berskala nasional.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik identitas berbasis keagamaan calon kepala daerah dalam relasi dengan organisasi keagamaan Alkhairaat pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Palu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena politik identitas berbasis keagamaan dalam konteks Pilkada 2024 Kota Palu. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur hubungan variabel secara statistik, melainkan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kompleksitas relasi antara aktor politik dan organisasi keagamaan secara kontekstual (Creswell, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur terhadap 8 informan yang dipilih secara *purposive*, terdiri dari pengurus Alkhairaat, tokoh agama, relawan kandidat, jamaah Alkhairaat, jurnalis media Alkhairaat, peneliti politik lokal, staf Humas Alkhairaat, dan akademisi dari Universitas Alkhairaat; (2) observasi lapangan di Kota Palu; (3) studi dokumentasi berupa berita, pernyataan resmi, dan arsip kegiatan; serta (4) studi literatur. Informan kunci adalah Pengurus Harian Alkhairaat karena memiliki otoritas dan pengetahuan langsung tentang kebijakan organisasi dalam menghadapi tekanan politik.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pengurus Alkhairaat, aktor politik, dan masyarakat), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi), serta *member check* untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Rujukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An*

expanded sourcebook (2nd ed.), SAGE Publications, yang merupakan edisi yang sama sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, selama kurang lebih dua bulan pada bulan Januari hingga Februari 2026, mencakup seluruh proses observasi awal, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi kegiatan kampanye terkait Alkhairaat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis politik identitas berbasis keagamaan calon kepala daerah dalam relasi dengan organisasi keagamaan Alkhairaat menggunakan teori Rambe dan Mayasari (2022) yang mengidentifikasi empat dimensi utama: (1) basis identitas sosial, (2) mobilisasi elit dan isu identitas, (3) konflik dan polarisasi sosial, serta (4) krisis identitas nasional dan ancaman terhadap integrasi.

3.1. Basis Identitas Sosial

Dimensi pertama menunjukkan bahwa calon kepala daerah di Kota Palu memanfaatkan kesamaan identitas keagamaan sebagai basis utama membangun kedekatan dengan pemilih. Berdasarkan hasil wawancara dengan jamaah Alkhairaat dan tokoh agama, kesamaan agama menjadi faktor awal yang membentuk persepsi keterpercayaan terhadap seorang kandidat. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Fahmi Jawwas selaku tokoh agama Alkhairaat, pemilihan pemimpin yang ideal dalam Islam seharusnya mempertimbangkan kemampuan dan akhlak, bukan semata-mata kesamaan suku atau daerah. Namun dalam praktiknya, kesamaan identitas keagamaan lebih mudah dijadikan alasan untuk memilih dibandingkan penilaian terhadap program dan kapasitas kandidat.

Salah seorang relawan kandidat, yaitu Muchammad Chusni Chazbullah, menyatakan bahwa dalam strategi pemenangan, pendekatan melalui kesamaan agama menjadi cara awal yang efektif untuk membangun dukungan. Masyarakat lebih cepat merasa dekat dengan kandidat yang dianggap satu bagian secara keagamaan, bahkan sebelum program kandidat dijelaskan secara rinci. Data Pilkada 2024 menunjukkan pasangan Hadianto–Imelda meraih 63,5% suara, jauh di atas pesaingnya, yang sebagian didukung oleh persepsi kedekatan dengan nilai-nilai keagamaan yang dipegang mayoritas masyarakat Kota Palu.

3.2. Mobilisasi Elit dan Isu Identitas

Dimensi kedua memperlihatkan penggunaan simbol-simbol keagamaan dan retorika berbasis identitas secara sistematis dalam kampanye Pilkada 2024. Berdasarkan dokumentasi

lapangan, beberapa kandidat melakukan ziarah ke makam Guru Tua (pendiri Alkhairaat), menghadiri Haul Guru Tua, serta aktif hadir dalam kegiatan pengajian dan festival keagamaan Alkhairaat menjelang Pilkada. Kegiatan-kegiatan ini diinterpretasikan oleh publik sebagai bentuk kedekatan kandidat dengan Alkhairaat, meskipun organisasi tersebut tidak memberikan dukungan resmi.

Syarif Hidayatullah selaku Jurnalis Media Alkhairaat mengonfirmasi bahwa retorika politik berbasis identitas sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat Kota Palu menilai kandidat. Masyarakat cenderung lebih mudah menerima pesan kandidat yang disampaikan dengan pendekatan nilai-nilai yang mereka kenal, terutama nilai-nilai keagamaan. Di era media sosial, konten berbasis agama lebih cepat viral dan dipercaya dibandingkan pesan programatik yang substansial. Hal ini menciptakan insentif bagi kandidat untuk terus mengeksploitasi simbol dan narasi keagamaan dalam kampanye digital mereka.

3.3. Konflik dan Polarisasi Sosial

Dimensi ketiga mengungkap dampak negatif politik identitas berbasis keagamaan terhadap kohesi sosial masyarakat Kota Palu. Fitra Handayani selaku Peneliti Politik Lokal dari Kantor KPU Kota Palu mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di mana perbedaan pilihan politik berubah menjadi kerenggangan hubungan sosial akibat dikaitkan dengan identitas keagamaan. Ketika agama dijadikan pembatas antargolongan dalam konteks politik, sesungguhnya agama telah disalahgunakan dari fungsi utamanya sebagai pemersatu umat.

Fenomena ini diperparah oleh penyebaran informasi yang belum terverifikasi (hoaks) berbasis identitas melalui media sosial. Zaenab Maruf selaku Staf Humas Alkhairaat menyatakan bahwa informasi semacam itu menyebar dengan cepat dan banyak orang langsung percaya tanpa melakukan pengecekan ulang, lalu menjadikannya dasar penilaian terhadap kandidat. Di sisi lain, polarisasi politik berbasis identitas juga menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk memusuhi kelompok yang berbeda pilihan, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan toleransi dan saling menghargai.

3.4. Posisi Alkhairaat: Independen namun Dieksploitasi

Temuan utama penelitian ini adalah kontradiksi antara posisi resmi Alkhairaat sebagai organisasi independen dengan realitas eksploitasi simbolik yang dilakukan oleh aktor-aktor politik. Staf Bidang Humas Alkhairaat menegaskan bahwa organisasi tidak pernah mengarahkan pilihan politik anggotanya dan tidak memberikan izin kepada siapapun untuk

menggunakan nama atau atribut organisasi sebagai alat kampanye. Alkhairaat lebih memfokuskan diri pada pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial keagamaan.

Namun demikian, para kandidat tetap berusaha mengaitkan diri dengan Alkhairaat melalui berbagai cara informal: menghadiri haul, berziarah ke makam Guru Tua, mendatangi pesantren, atau memanfaatkan kedekatan personal dengan tokoh-tokoh Alkhairaat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai simbolik Alkhairaat sangat tinggi dalam kontestasi elektoral Kota Palu, sehingga menjadi rebutan legitimasi meski organisasi secara resmi menolak untuk terlibat dalam politik praktis.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan ini sejalan dengan penelitian Firdaus dan Andriyani (2021) yang menegaskan bahwa kehadiran identitas agama secara signifikan memengaruhi dinamika politik lokal di Indonesia. Sama halnya dengan penelitian Wati (2021) yang menemukan menguatnya politik identitas berbasis agama di berbagai daerah Indonesia, praktik serupa terjadi di Kota Palu dengan Alkhairaat sebagai modal simbolik utama yang diperebutkan kandidat.

Berbeda dengan temuan Warsah (2018) yang menemukan bahwa identitas keislaman dapat menjadi faktor pemersatu dalam masyarakat multiagama, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan identitas keislaman dalam konteks Pilkada justru memunculkan potensi polarisasi dan ketegangan sosial. Hal ini memperkuat temuan Yunus dkk. (2023) yang menyatakan bahwa politisasi agama dalam pemilu berpotensi merusak nilai-nilai toleransi dan integrasi nasional.

Temuan ini juga memperluas kerangka teori Rambe dan Mayasari (2022) dengan menambahkan dimensi penting: organisasi keagamaan yang secara formal menolak keterlibatan dalam politik dapat tetap menjadi objek eksploitasi simbolik oleh aktor-aktor politik melalui pendekatan informal dan kultural. Senada dengan hal tersebut, Hadiz (2018) dalam kajiannya pada jurnal bereputasi Scopus menegaskan bahwa mobilisasi populisme Islam di Indonesia bersifat oportunistis—aktor politik memanfaatkan simbol keagamaan tanpa harus memiliki komitmen ideologis yang mendalam.

Aspek lain yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya adalah posisi Alkhairaat sebagai aktor pasif yang justru semakin bernilai secara elektoral karena independensinya. Semakin sebuah organisasi keagamaan menegaskan ketidakterlibatannya dalam politik, semakin tinggi nilai simbolik yang dapat diekstrak oleh kandidat yang berhasil memperlihatkan kedekatan informal dengannya. Fenomena paradoks legitimasi ini belum

dibahas secara eksplisit dalam penelitian terdahulu dan merupakan kontribusi orisinal penelitian ini.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan fenomena menarik berupa paradoks legitimasi: semakin sebuah organisasi keagamaan menegaskan independensinya, semakin besar nilai simboliknya bagi kandidat yang ingin menunjukkan kedekatan dengan organisasi tersebut. Alkhairaat yang dikenal sebagai organisasi yang tidak berpolitik justru menjadi lebih berharga secara elektoral karena dipersepsikan sebagai simbol integritas dan kesalehan yang dapat dipindahkan secara simbolik kepada kandidat yang berhasil mengasosiasikan dirinya dengan organisasi tersebut. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan organisasi keagamaan dalam menjaga batas-batas partisipasi politiknya agar tidak mudah dieksploitasi oleh kepentingan elektoral jangka pendek.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik identitas berbasis keagamaan secara signifikan mewarnai dinamika Pilkada 2024 di Kota Palu, di mana pemanfaatan identitas religius Alkhairaat berpengaruh terhadap elektabilitas dan legitimasi sosial calon kepala daerah melalui tiga mekanisme utama: basis identitas sosial, mobilisasi elit dan isu identitas, serta konflik dan polarisasi sosial. Meskipun Alkhairaat secara institusional menjaga posisi independen, aktor-aktor politik terus mengeksploitasi modal simbolik organisasi melalui pendekatan informal dan kultural.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa terbatasnya akses terhadap aktor elit politik, sensitivitas isu politik-keagamaan yang memengaruhi keterbukaan informan, serta kesulitan membedakan antara dukungan masyarakat yang murni dengan narasi yang dikonstruksi secara politis. Penelitian juga terbatas pada satu wilayah kota sehingga generalisasinya perlu dilakukan dengan hati-hati.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh informan penelitian di Kota Palu, khususnya Pengurus Alkhairaat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga. Terima kasih pula kepada Bapak Ardika Nurfurqon, S.STP., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan

bimbingan dan arahan selama proses penelitian, serta kepada seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alesina, A., & La Ferrara, E. (2005). Ethnic Diversity And Economic Performance. *Journal Of Economic Literature, 43*(3), 762–800. Https://Doi.Org/10.1257/002205105774431243

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale: Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*. Cornell University Press. Https://Doi.Org/10.7591/9781501735547

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (5th Ed.). Sage Publications.

Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global, 2*(2), 47–52. Https://Doi.Org/10.24853/Independen.2.2.47-52

Fox, J. (2018). *An Introduction To Religion And Politics: Theory And Practice* (2nd Ed.). Routledge. Https://Doi.Org/10.4324/9781315268545

Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Journal Of Government And Politics, 3*(1), 109–126. Https://Doi.Org/10.18196/Jgp.2012.0007

Hadiz, V. R. (2018). Imagine All The People? Mobilising Islamic Populism For Right-Wing Politics In Indonesia. *Journal Of Contemporary Asia, 48*(4), 566–583. Https://Doi.Org/10.1080/00472336.2018.1433225

Hanan, D. (2020). Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance And Limitation. *Jurnal Wacana Politik, 5*(1), 15–27. Https://Doi.Org/10.24198/Jwp.V5i1.27710

Khairi, H. (2022). Kepemimpinan Kepala Daerah Dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi, 9*(1), 24–39. Https://Doi.Org/10.35517/Japb.V9i1.1012

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd Ed.). Sage Publications.

Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, And Authoritarian Populism*. Cambridge University Press. Https://Doi.Org/10.1017/9781108595841

Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 46*(1), 1–20. Https://Doi.Org/10.33701/Jipwp.V46i1.993

Nurfurqon, A. (2022). Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *48*(2), 89–105. Https://Doi.Org/10.33701/Jipwp.V48i2.1134

Pitono, A. (2019). Birokrasi Dan Politik Lokal: Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Kontestasi Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *45*(2), 113–128. Https://Doi.Org/10.33701/Jipwp.V45i2.807

Rambe, T., & Mayasari, S. (2022). Politik Identitas Dan Krisis Identitas: Mengungkap Realitas Praktek Politik Di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, *8*(1), 91–105. Https://Doi.Org/10.24952/El-Qanuniy.V8i1.5608

Slater, D., & Simmons, E. (2013). Coping By Colluding: Political Uncertainty And Promiscuous Power-Sharing In Indonesia And Bolivia. *Comparative Political Studies*, *46*(11), 1366–1393. Https://Doi.Org/10.1177/0010414012453447

Tarigan, M. H. (2021). Dinamika Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Pascareformasi. *Jurnal Bina Praja*, *13*(2), 285–297. Https://Doi.Org/10.21787/Jbp.13.2021.285-297

Warsah, I. (2018). Relevansi Relasi Sosial Terhadap Motivasi Beragama Dalam Mempertahankan Identitas Keislaman Di Tengah Masyarakat Multi Agama. *Kontekstualita*, *34*(2), 149–177. Https://Doi.Org/10.30631/Kontekstualita.V34i02.42

Wati, W. (2021). Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis. *Jurnal Pendidikan Pkn (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *2*(2), 60–68. Https://Doi.Org/10.26418/Jppkn.V2i2.44627

Weinstein, J. M. (2007). *Inside Rebellion: The Politics Of Insurgent Violence*. Cambridge University Press. Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9780511808661

Yunus, F., Yasin, T., & Rijal, S. (2023). Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, *9*(2), 121–137. Https://Doi.Org/10.29103/Jsds.V9i2.12590